BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

"Pelangi takkan indah bila hanya satu warna," kata Indra Cahyadi, seorang buddhis, siang itu. Menyambut kalimat itu, tepuk tangan riuh keluar dari 77 pemuda Protestan, Katolik, Ortodoks, Buddha dan Islam. Definisi 'pluralisme' menurut Indra itu muncul dalam *Youth Interfaith Camp* di Hotel Cherish, Lembang, Sabtu, 9 Maret 2013 silam.

Membicarakan pluralisme agama takkan ada habisnya. Di Indonesia, istilah ini mulai bersemi sekitar tahun 1960-an. Kehadiran pluralisme agama ditegaskan oleh orasi pembaruan Islam dari Nurcholish Madjid yang berisi liberalisme, sekularisme dan pluralisme. Menurut Cak Nur, Islam akan maju bila mengadopsi tiga ide itu.

Pluralisme, bersama dengan eksklusif juga inklusif, adalah tipe sikap keberagamaan. Dalam *sikap eksklusif*, umat memandang hanya agamanya yang benar sedangkan lainnya salah; dalam *sikap inklusif*, umat memandang ada kebaikan pada agama lain walau demikian agamanya sendiri tetap lebih baik; dalam *sikap pluralis*, umat memandang sahnya masing-masing agama menuju keselamatan (Rachman, 2010).

Pembicaraan mengenai pluralisme mulai dilirik oleh pemerintah Indonesia zaman Soeharto dengan memulai Musyawarah Antar Agama, dilanjutkan Menteri

Agama Mukti Ali yang menginisiasi dialog lintas agama. Kemudian meredup menjelang runtuhnya Orde Baru (Husein, 2010).

Pada reformasi, wacana pluralisme di masyarakat Indonesia ini berbalik arah pada tahun 2005. Tahun itu ada dua kejadian besar yakni fatwa haram dari MUI dan penyerangan FPI ke kelompok Ahmadiyah di Bogor. Menurut MUI, pluralisme didefinisikan sebagai sinkretisme agama, dan karena itu umat Islam dilarang mengikutinya. Sejak itu, muncul juga banyak definisi dari banyak kalangan, termasuk oleh para tokoh agama. Pluralisme oleh kalangan kontra dianggap sebagai "musuh agama-agama" (Husaini, 2010) sedangkan oleh kalangan pro dianggap sebagai "penyelamat agama-agama" (Shofan, 2011).

Selain fatwa MUI itu, kasus penyerangan telah membuat pluralisme berbelok. Awalnya pluralisme bicara bagaimana membangun hubungan antar komunitas agama, kini pluralisme mundur sejenak dan melihat bagaimana kelompok minoritas belum diakui hak-haknya. Di sinilah bagaimana istilah pluralisme bertemu dengan pembicaraan HAM, Pancasila dan negara.

Akhir-akhir ini, istilah pluralisme ini kembali digalakan oleh tokoh seperti Dawam Rahardjo, Jalalludin Rakhmat dan Abdurahman Wahid untuk menjawab intoleransi di masyarakat. Pluralisme, mau tak mau, jadi banyak berbicara kebebasan beragama dan intoleransi atas nama agama.

Sebuah survei dari Center of Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. Dalam survei ini, ada 59,5 persen responden tidak berkeberatan bertetangga dengan orang beragama lain. Sekitar 33,7 persen lainnya menjawab sebaliknya. Saat ditanya

soal pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan lebih baik hal itu tidak dilakukan. Hanya 22,1 persen yang tidak berkeberatan. Penelitian dilakukan pada Februari 2012 di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 responden[1].

Melihat kembali sejarahnya, kekerasan atas nama agama sudah terjadi sejak rezim Soeharto. Sebuah studi dari Yayasan Wakaf Paramadina dan MPRK UGM menemukan sebanyak 832 insiden konflik keagamaan terjadi di Indonesia (Januari 1990 - Agustus 2008). Sekitar duapertiga dari seluruh insiden mengambil bentuk aksi damai, sedangkan sepertiga lainnya terwujud dalam bentuk aksi kekerasan[2].

Di Indonesia era reformasi, kita melihat banyak konflik, baik etnis maupun agama (Kansong, 2013). Krisis intoleransi muncul dalam bentuk kekerasan. Data The Wahid Institute pada 2012 menyebutkan, telah terjadi 274 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 363 tindakan. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparatus negara sebanyak 166 tindakan, sementara oleh non- aparatus negara sebanyak 197 tindakan.

---

[1] Dikutip dari http://www.tempo.co/read/news/2012/06/05/173408521/Survei-Toleransi-Beragama-Orang-Indonesia-Rendah

[2] Data *Laporan Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, dari Yayasan Wakaf Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM dan The Asia Foundation

Gambar 1.1

Penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura

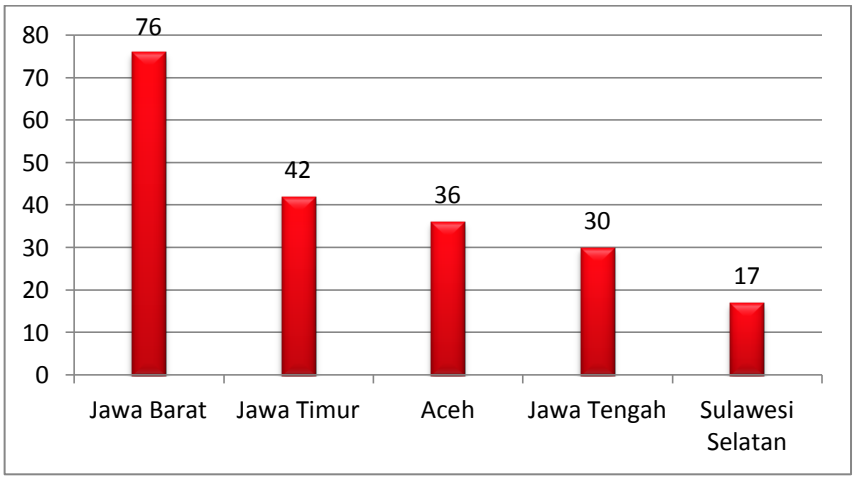


Sumber : Human Rights Working Group, 2013

Data yang sama menyebut Jawa Barat menempati predikat provinsi paling intoleran. Posisi Jawa Barat itu dikonfirmasi pula oleh laporan Setara Institute pada tahun yang sama. Setara mencatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 371 bentuk tindakan. Tersebat di 28 propinsi. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat (76) peristiwa, Jawa Timur (42) peristiwa, Aceh (36) peristiwa, Jawa Tengah (30) peristiwa, dan Sulawesi Selatan (17) peristiwa.

Grafik 1.1

Angka pelanggaran kebebasan beragama



Sumber : Data Setara Institute, 2012

Posisi Jawa Barat ini sudah tiga tahun disandang. Data The Wahid Institute menyebutkan di Jawa Barat ada 57 kasus di 2010, naik jauh hingga 128 kasus di 2011, dan turun ke 102 kasus di 2012. Perserikatan Bangsa Bangsa mencatat pada tahun 2012 ada 62 kasus intoleransi di Jawa Barat. Mengantarkan Jawa Barat jadi daerah paling intoleran di Indonesia versi PBB.

Kehadiran ormas-ormas garis keras turut memengaruhi angka kasus intoleransi di Jawa Barat. Disebutkan Subhi Azhari, kebanyakan kelompok massa yang terlibat kekerasan adalah yang lahir pascareformasi. Tidak berkorelasi dengan organisasi arus utama seperti Muhammadiyah, NU dan Persis[3].

[3] Dalam makalah "Menguak Potret Kebhinnekaan Jawa Barat 3 Tahun Terakhir" oleh Subhy Azhari dalam Forum Merah Putih di Gedung Indonesia Menggugat, 4 Februari 2013

Maraknya kasus kekerasan atas nama agama membuat lembaga HAM internasional Human Right Watch mengeluarkan laporan soal Indonesia pada Februari 2013. Laporan itu menyebutkan kasus Ahmadiyah di Cikeusik sebagai "*it is a part of a growing trend of religious intolerance and violence in Indonesia"* (Bagian dari tren intoleransi dan kekerasan agama di Indonesia yang meningkat)[4].

Dari iman ke kekerasan, berakhir ke persidangan. Sebab maraknya kasus intoleransi, pluralisme jadi berkaitan dengan relasi agama dan negara. Sebagaimana tokoh-tokoh pluralisme Indonesia seperti Gus Dur, Musdah Mulia, dan Dawam Raharjo adalah orang yang mengajukan permohonan uji terhadap UU Penodaan Agama (LBH, 2012).

Perdebatan mengenai makna pluralisme agama ini, selain makin melebar ke banyak tema, juga berlangsung alot lantaran perbedaan makna yang dimiliki. Pihak pro menolak definisi pluralisme agama yang dikeluarkan MUI sebagai pihak kontra. Sebagai istilah, pluralisme agama ini telah didefinisikan beragam.

Makna 'pluralisme agama' tidak ada di dalam simbol alfabetnya, melainkan dibentuk dari kesepakatan yang dilangsungkan lewat pertukaran simbol. Lewat komunikasi ini, makna-makna dibentuk, dikompromikan dan disepakati bersama.

Bentuk paling nyata dalam komunikasi adalah bahasa (Sihabudin, 2011) dan dengan komunikasilah manusia membentuk masyarakat dan kebudayaannya. Bahasa secara tidak langsung ikut membentuk kebudayaan, termasuk aturan komunikasi, simbol dan maknanya. Mulyana (2012) meringkas, "*languages represents culture"* (bahasa menunjukan budaya).

---

[4] Dalam "*In Religion's Name ; Abuses Againts Religious Minorities in Indonesia*" oleh Human Right Watch, Februari 2013

Seperti dikutip oleh Mandelbaum (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2010), Edward Sapir mengingatkan ilmuwan sosial bahwa :

> "*... the Real World is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the group... We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation*" (dunia nyata adalah perluasan bawah sadar yang sangat besar yang dibangun dari kebiasaan bahawa kelompok. Kita melihat dan mendengar atau dengan kata lain mengalami seperti yang kita lakukan karena kebiasaan bahasa kelompok kita mepredisposisi beberapa pilihan interpretasi). (Mulyana dan Rakhmat, 2010)

Pemikiran Sapir-Whorf itu diperkuat pula oleh pandangan etnografi bahwa:

> "Bahasa menjadi unsur pertama sebuah kebudayaan, karena bahasa akan menentukan bagaimana masyarakat penggunanya mengkategorikan pengalamannya. Bahasa akan menentukan konsep dan makna yang dipahami oleh masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan pengertian mengenai pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, makna budaya yang mendasari kehidupan masyarakat terbentuk dari hubungan antara simbol-simbol/bahasa". (Basrowi dan Sukidin dalam Kuswarno, 2008)

Bahasa itu licin. Hubungan antara simbol yang dipilih dan makna yang disepakati kadang berubah-ubah (Berger & Hill dalam Samovar, 2010: 269). Lebih lengkap, Samovar menuliskannya sebagai berikut :

> Bahasa mengizinkan orang-orang membentuk kelompok dan terlibat dalam usaha yang kooperatif baik dalam skala besar maupun kecil. Kosakata yang digunakan bersama memungkinkan untuk merekam dan memelihara kejadian masa lalu, sekalipun hanya dengan interpretasi selektif. Rekaman ini menjadi catatn sejarah suatu komunias yang disampaikan ke henerasi berikutnya, menjadi faktor penyatu... Dengan kata lain, bahasa menolong mempertahankan sejarah yang menyatukan kita (Samovar, 2010: 269)

Menurut Wittgenstein (dalam Littlejohn, 2010), percakapan tak lebih dari permainan bahasa. Artinya setiap orang melakukan ini dan bukan itu atas pertimbangan kepatutan dan makna dalam budayanya.

Bahasa, bagaimanapun, berperan besar dalam membentuk dan menyatakan identitas lebih dari yang dibayangkan. Karenanya, bahasa pula yang menentukan siapa yang tergabung dalam kelompok dan siapa yang tidak (Samovar, 2010). Komunikasi menegaskan komunitas, bukan kebetulan bila kedua kata itu bermiripan.

Perlu digarisbawahi bahwa budaya di sini berarti pula sub-kultur misalnya kelompok punk, pengajian atau komunitas lintas-iman seperti Jakatarub. Masing-masing kelompok itu akan memiliki sistem komunikasinya sendiri, misalnya penggunaat *aksen*, *dialek*, *argot*, *slang* dan *branding*.

Lewat berbagai kesepakatan sosial, aturan komunikasi setiap kelompok orang pun menjadi khas. Satu kata yang positif bagi kelompok tertentu bisa berlaku sebaliknya. Aturan komunikasi pula yang menentukan siapakah orang yang termasuk dalam kelompok itu dan yang bukan. Pada gilirannya, orang-orang di dalam kelompok itu juga menentukan bagaimana makna-makna dipertukarkan.

Hal tersebut terjadi pula dalam sebuah organisasi atau komunitas. Setiap kelompok akan memiliki aturan komunikasinya sendiri, menyangkut di dalamnya kosakata dan maknanya. Hal ini didukung pula oleh komunikasi organisasi perspektif subyektif yang menyebutkan bahwa komunikasi dalam organisasi adalah pembentukan makna.

Salah satunya adalah komunitas lintas-iman *Jaringan Kerja Antarumat Beragama*, disingkat Jakatarub, berbasis di Bandung. Sejak kelahirannya 2002 lalu, mereka banyak melakukan kegiatan soal kerukunan lintas-iman. Komunitas ini menggunakan istilah *pluralisme* dalam kegiatan dan publikasi mereka.

Komunitas ini melakukan beberapa jenis kegiatan, antara lain diskusi, seminar dan silaturahmi. Pada 18 November 2012, misalnya, Jakatarub dan sebelas komunitas peduli keragaman melakukan deklarasi Bandung Lautan Damai. Acara ini diisi oleh orasi budaya dari Aat Soeratin dan Ridwan Kamil, serta atraksi budaya seperti karinding.

Pada Desember 2012, Jakatarub bekerjasama dengan Gereja Kristen Pasundan Mengadakan Seminar "Diskriminasi Perda". Pada 8 Januari 2013, mereka mengadakan *Kongkow Media Jakatarub* yang membahas situasi media massa dan perlunya media alternatif yang inklusif.

Di akhir Januari, mereka memperingati wafatnya Gus Dur dengan mengadakan *Diskusi Buku Gus Dur, Bapak Tionghoa Indonesia*. Acara ini diadakan hasil kerjasama dengan Majelis Agama Khonghucu (Makin) Bandung. Pembicara yang hadir adalah Wakil Ketua Makin Bandung, Ketua Jakatarub Wawan Gunawan dan puteri Gus Dur Alissa Wahid.

Bulan berikutnya, Jakatarub bersama Gereja Kristen Pasundan dan Universitas Kristen Maranatha mengadakan pelatihan pemuda lintas-iman. Acara yang diadakan di Lembang ini mempertemukan 78 pemuda dari Islam, Kristen dan Buddha. Di sini, ketua Jakatarub Wawan Gunawan bertindak sebagai pembicara. Pada akhir Maret, kembali dengan Layar Kita, Jakatarub mengadakan bedah buku "Titik Nol" karya Agustinus Wibowo.

Pada April 2013, Jakatarub dan Layar Kita mengadakan bedah film Dekalog 9. Acara ini membahas film yang berkisah tentang perintah Tuhan ke-9 versi

Katolik. Pembahas sendiri adalah Rektor STT Jakarta, yang dihadirkan oleh Jakatarub.

Selain mengadakan acara bulanan, Jakatarub juga kerap diundang untuk hadir di berbagai kegiatan komunitas agama. Misalnya saja penahbisan pendeta David Roestandi pada awal Februari, juga Kirab Cap Go Meh pada awal Maret. Jakatarub juga pernah mengadakan acara buka puasa bersama dengan Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Bandung.

Di samping berkegiatan, Jakatarub juga menerbitkan beberapa media, yakni selebaran bulanan bertajuk *Catatan Kecil*, dan majalah tribulanan bertajuk *Bianglala* bekerjasama dengan GKP Bandung.

Di samping kegiatan formal dan besar, anggota Jakatarub juga sering berkumpul dalam rangka merencanakan kegiatan atau membicarakan isu. Biasanya, kegiatan begini dilakukan setelah sebuah acara selesai dilaksanakan, setelah peserta pulang, mereka akan berkumpul dulu dan mengobrol. Ada pun acara kumpul yang betul-betul di luar kegiatan tidak terjadi.

Definisi pluralisme sebagai sinkretisasi ditolak oleh komunitas ini. "Mengusung pluralisme sesungguhnya tidak sedang membela siapa-siapa," tulis Koordinator Jakatarub Wawan Gunawan di selebaran komunitasnya. Dia melanjutkan, "Tetapi membela prinsip hidup bersama berdasarkan aturan main bersama yang kita sebut sebagai hukum, bagi orang-orang dengan latar belakang berbeda yang hidup dalam suatu wilayah bernama Indonesia[5]".

[5] Dalam artikel "Meluruskan Pluralisme" di Catatan Kecil edisi Maret 2013

Menentang arah MUI, Jakatarub menganggap bahwa pluralisme yang MUI maksud adalah salah kaprah. Bersamaan dengan itu, kelompok ini juga menggunakan istilah pluralisme di berbagai kegiatan, hingga obrolan sehari-hari antar anggotanya. Di tengah monopoli makna oleh MUI, Jakatarub menyelenggarakan kegiatan rutin yang tak lepas dari istilah pluralisme.

Lewat berbagai kegiatan di atas, disadari atau tidak, Jakatarub telah menggunakan, mengkompromikan sekaligus membentuk makna pluralisme agama. Makna ini diekpresikan melalui unit dasar sebuah bahasa yakni tindak tutur. Dalam tindak tutur, setiap individu ini bekerjasama dan saling berkontribusi untuk mengatur, memperkirakan dan membentuk pesan sebagai modal jalannya percakapan.

Sebuah tindak tutur mencangkup tiga aspek yakni *lokusi*, *ilokusi* dan *perlokusi*. *Lokusi* adalah soal bentuk pesannya, *ilokusi* adalah ekspektasi dari pembuat pesan, dan *perlokusi* adalah dampak pesan terhadap pendengarnya. Ketiganya dilakukan dengan sangat cepat di antara para peserta komunikasi.

Dalam penelitian ini, makna pluralisme agama diambil dari tindak tutur para anggotanya dalam interaksi sehari-hari. Keadaan di lapangan menyebutkan bahwa anggota Jakatarub menggunakan istilah pluralisme agama lebih banyak saat interaksi informal mereka. Di acara, istilah ini justru dihindai. Interkasi jenis ini peneliti pilih karena dianggap telah memenuhi keperluan penelitian ini. Percakapan anggota Jakatarub mengenai pluralisme agama akan dianalisis melalui aspek *lokusi*, *ilokusi* dan *perlokusi*. Temuan itu akan diolah sehingga memunculkan makna pluralisme agama bagi mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Makna mengenai pluralisme agama menjadi penting. Maka, penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Pertanyaan Makro

Bagaimana tindak tutur komunikasi anggota *Jaringan Kerja Antarumat Beragama* mengenai makna pluralisme agama melalui interaksi sehari-hari?

1.2.2 Pertanyaan Mikro

1. **Bagaimana tindak tutur lokusi** anggota *Jaringan Kerja Antarumat Beragama* mengenai makna pluralisme agama melalui interaksi sehari-hari?
2. **Bagaimana tindak tutur ilokusi** anggota *Jaringan Kerja Antarumat Beragama* mengenai makna pluralisme agama melalui interaksi sehari-hari?
3. **Bagaimana tindak tutur perlokusi** anggota *Jaringan Kerja Antarumat Beragama* mengenai makna pluralisme agama melalui interaksi sehari-hari?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui dan menguraikan tindak tutur anggota *Jaringan Kerja Antarumat Beragama* (Jakatarub) mengenai makna pluralisme melalui interaksi sehari-hari.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. **Untuk mengetahui tindak tutur komunikasi** anggota *Jaringan Kerja Antarumat Beragama* mengenai makna pluralisme agama melalui interaksi sehari-hari.
2. **Untuk mengetahui tindak tutur ilokusi** anggota *Jaringan Kerja Antarumat Beragama* mengenai makna pluralisme agama melalui interaksi sehari-hari.
3. **Untuk mengetahui tindak tutur perlokusi** anggota *Jaringan Kerja Antarumat Beragama* mengenai makna pluralisme agama melalui interaksi sehari-hari.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini secara umum memberi sumbangan pengetahuan dalam khazanah ilmu komunikasi juga komunikasi organisasi dalam perspektif subjektif; ada pun secara khusus, pada analisis percakapan, terutama mengenai pembentukan makna dalam sebuah komunitas lintas-iman.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain teoretik, berikut adalah kegunaan praktis dari penelitian ini :

1. **Bagi Peneliti**

   Penelitian ini adalah sarana dalam mengembangkan aspek kognisi, terutama mengenai makna pluralisme agama. Selain itu, penelitian ini adalah bentuk implementasi ilmu yang selama ini peneliti peroleh. Juga sebagai tanggung jawab pada masyarakat selaku kalangan akademik.

2. **Bagi Universitas dan Akademisi**

   Penelitian ini menjadi literatur untuk acuan mahasiswa selanjutnya. Penelitian ini pun membantu para akademisi dari bidang komunikasi, budaya dan ilmu-ilmu agama mengenai makna pluralisme agama dalam sebuah komunitas lintas-iman.

3. **Bagi Jaringan Kerja Antarumat Beragama (Jakatarub)**

   Penelitian ini membantu anggota Jakatarub memahami makna pluralisme agama yang telah mereka bentuk. Hal dapat menjadi masukan bagi mereka dalam merumuskan metode sosialisasi pluralisme dengan lebih baik.

4. **Bagi masyarakat**

   Penelitian ini dapat jadi referensi bagi mereka yang tertarik dengan isu pluralisme agama, termasuk kekerasan atas nama agama. Penelitian ini membantu masyarakat mengenal pluralisme agama dari komunitas yang giat menyebarkannya.